

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi *Covid-19* tetap dilaksanakan karena ini merupakan keharusan pertanggungjawaban dari anggaran pemerintah dalam mengelola APBD/APBN. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada masa pandemi dilakukan dengan cara *desk audit* atau *work from home/ office* untuk menghindari penyebaran virus *Covid-19*. BPK tidak terkena dampak pengalihan anggaran penanganan *Covid-19*, karena banyak anggaran BPK yang tidak terserap dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. Pada awal tahun 2021, pemeriksaan sudah dilakukan secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan diantaranya, pemeriksaan yang dilakukan dengan jarak jauh masih beresiko, terbukti dari pertanggungjawaban suatu kegiatan ataupun pengecekan fisik yang tidak maksimal. Selain itu, dalam peta jabatan BPK, komposisi level pemeriksa yang dibutuhkan dalam suatu pemeriksaan

belum merata sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.

2. Tindak lanjut terhadap kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPK terhadap penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran *Covid-19* yang dinyatakan bukan kerugian Negara oleh aparat penegak hukum dalam pengalihan anggaran *Covid-19* yang begitu besar menciptakan celah dalam penyelewengan peruntukan dana *Covid-19*. Menurut SPKN, BPK menetapkan kerugian negara yang dialami oleh suatu pemerintah daerah. Dalam hal pemeriksaan BPK menyatakan suatu kerugian negara, aparat penegak hukum dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bukti petunjuk apabila terdapat indikasi tindak pidana.

B. Saran

1. Dengan adanya pandemi *Covid-19* yang membatasi pemeriksaan BPK secara konvensional, diharapkan untuk masa yang akan datang BPK lebih siap dalam melaksanakan pemeriksaan baik dari metode pemeriksaannya, komposisi pemenuhan pemeriksa, maupun kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pemeriksaan yang bersifat non-konvensional atau darurat. Diharapkan juga BPK dalam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan peertanggungjawaban anggaran lebih agar lebih mengawal hasil pemeriksaan serta rekomendasi-rekomendasinya terlebih kepada penyelewengan keuangan negara serta kerugian negara yang

timbul akibat pihak-pihak tertentu yang tidak cakap dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Dalam mengelola tata pemerintahan yang baik, maka diantaranya adalah pelaksanaan pembangunan daerah, pengetasan kemiskinan, pemberian bantuan, penyerapan anggaran yang bijak, dan lainnya. Oleh karena itu pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menggunakan amanah yang diberikan oleh rakyat dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran dengan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Serta penerapan sanksi yang seharusnya tanpa pandang bulu kepada siapapun yang keluar jalur. Dengan begitu maka akan terciptalah suatu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang diidam-idamkan masyarakat.

